

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai kebijakan Gubernur Jawa Barat tentang pendidikan militer sebagai upaya penanggulangan kenakalan remaja, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menerapkan pendidikan militer bagi peserta didik SMA/SMK melalui barak militer dinilai memiliki kelemahan dari sisi legalitas dan keselarasan norma hukum positif. Secara hirarki, Surat Edaran yang menjadi basis kebijakan ini bukanlah peraturan perundang-undangan yang dapat menciptakan norma baru yang membatasi hak asasi manusia atau mengatur subjek hukum secara luas. Kebijakan ini juga ditemukan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena mengubah pendekatan pedagogis-edukatif menjadi instruktif-militeristik, serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait jaminan keamanan fisik dan psikis anak di lingkungan pendidikan.

2. Tinjauan Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, meskipun Gubernur sebagai *ulil amri* di daerah memiliki otoritas untuk melakukan inovasi kebijakan demi kemaslahatan umat (*tasharruful imam 'ala ra'iiyyah manuthun bil maslahah*), kebijakan ini dianggap tidak memenuhi prinsip ketaatan hirarkis (*uqud*). Legitimasi tindakan penguasa dalam Islam tidak hanya didasarkan pada manfaat praktis semata, tetapi harus selaras dengan aturan yang lebih tinggi (pemerintah pusat/Undang-Undang) yang telah disepakati bersama.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini dengan memperkuat landasan regulasinya melalui Peraturan Daerah agar memiliki kepastian hukum dan legitimasi yang kuat. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menggeser metode pembinaan dari pola militeristik murni menjadi pola pendidikan karakter yang lebih humanis, edukatif, dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

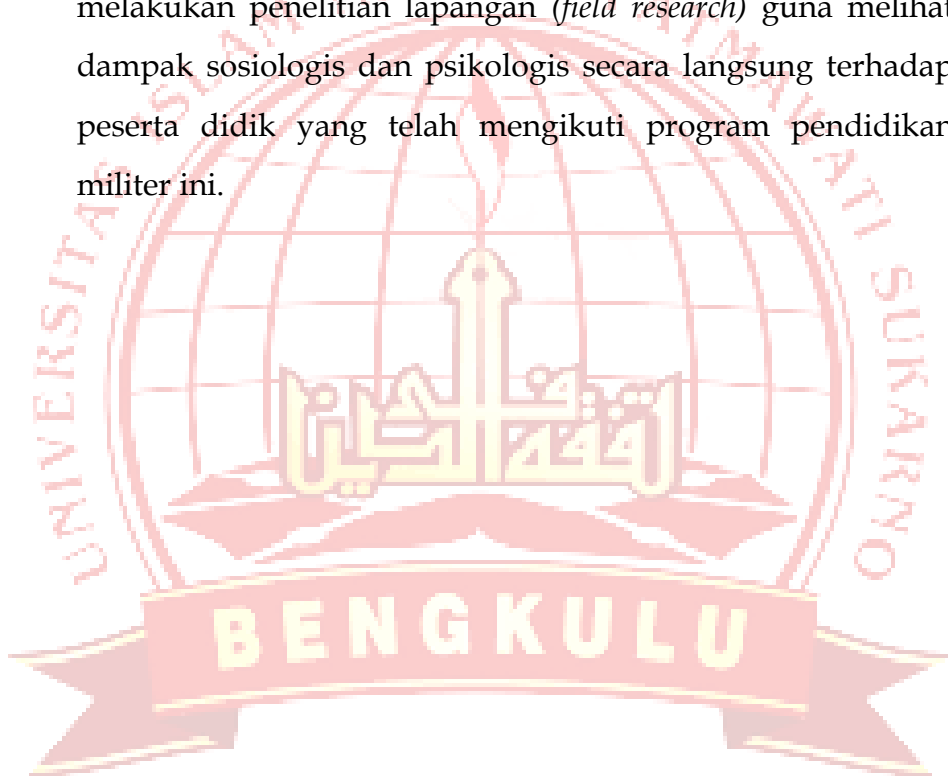
2. Bagi Instansi Terkait (Dinas Pendidikan dan TNI)

Diharapkan adanya sinkronisasi kurikulum yang lebih jelas antara pembinaan karakter bela negara dengan sistem pendidikan nasional, sehingga tidak terjadi dualisme

otoritas yang membingungkan pelaksana di lapangan serta tetap menjamin perlindungan hak-hak anak selama masa pembinaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat keterbatasan penelitian ini yang bersifat yuridis normatif, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) guna melihat dampak sosiologis dan psikologis secara langsung terhadap peserta didik yang telah mengikuti program pendidikan militer ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Qur'an Al-Karim, Surah An-Nisa

B. Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani Press, 2020)

Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Diana Halim K, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia: bogor, 2018)

Dinas Sejarah TNI AD, *Sejarah Pengabdian Komando Daerah Militer III/Siliwangi*, (Bandung: Disjarahad, 2018), hlm. 104.

Doni Koesmoma, "Pendidikan Karakter: Utuh dan Menyeluruh". (Jakarta: Grafindo, 2018)

Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam dalam Rambu rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2018)

Elias M. Awad, Richard D. Irwin, *System Analysis and Design*, Homewood, Illionis, 2019

Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Khozim, Bandung: Nusa Media, 2022

Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, (Pekanbaru: Suska Press, 2019)

Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Ed, Revisi, Cet, 4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rarajawali Pers, 2023)

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021),

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2023)

Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003)

Liya Aina, *TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN, HERMEUNITIKA*, (Jakarta: 2021)

- M. Syahri R. Simangunsong, 2018, *Realita Hukum Pertanahan Indonesia : Dilematis Kepentingan Hak Privat dan Publik*, Komojoyo Press, Yogyakarta
- Marbun, S.F, *Pendidikan Administrasi dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2019
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: PT. Alumni Penerbit Akademik, 2022)
- Mohammad Adnan, *filsafat hukum islam: teori dan implementasi*, (PT Penerbit Qriset Indonesia Utama, Jawa Tengah, 2021)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konsep, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2020)
- Nimatul Huda, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2020)
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*,
- Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum (edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2023)

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021)

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Gadjah Mada University Press, 2025)

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024)

Rahmat Hidayat, *Ilmu Pendidikan*, Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Press: Jakarta) 2018

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020)

Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam "Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII" di Denpasar, 14-18 Juli 2019

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Responsif*, (Jakarta: Total Media, 2019)

Saparudin, *Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Militer Di Asrama Militer Batalyon Kavaleri 6 Naga Karimata Medan Sunggal Kecamatan Medan Selayang Tahun 2018*, (UIN Sumatera Utara: Medan, 2018).

Sarjipto Raharjo *Pengantar Filsafat Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Jakarta:2021)

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2020)

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).

Soetanto Soepiadhy, *Undang-Undang Dasar 1945 : Kekosongan Politik Hukum Makro*, (Purwangan: Kepel Press, 2024)

Tatang. M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Rajawali Press, 2021)

Teguh Prasetyo, *Hukum Bemartabat: Reorientasi Pemikiran Hukum Berbasis Pancasila*, (Nusa Medya , 2018), ,

C. JURNAL

Aji Halim Rahman, *"Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare state)"*, Jurnal *Presumption of Law*, Vol 3 Nomor 2, Oktober 2021

Ateng Syafrudin, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN*, Jurnal *Pro Justisia* Edisi , Universitas Parahyangan, Bandung, 2022

Doris L. Mackenzie, *"Effect of corretional boot camp on offending"*, ,(the campbell collaborttion :oslo,2003.)

- Fence M. Wantu, *"Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata"*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 25 Nomor 2, Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2017
- Fokky Fuad, *"Falsafah Hukum Pancasila, Reaktualisasi Staatsfundamentalnorm"*. Lex Jurnalica. Vol. 13 Nomor 3. 2016.
- Kasman Abdullah, *"Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance"*, Jurnal Meritokrasi, Vol. 1 Nomor 1, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019
- Muhammad Zainul Arifin, et.al, *"Perlindungan Hukum dari Negara Terhadap Masyarakat Fakir Miskin Menurut Konsep Welfare state (Studi Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Kota Palembang)"*, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 5 Nomor 2, 2020
- Nunik Nurhayati, et.al, *"Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos Di Tengah Pandemi Covid-19"*. Jurnal Res Judicata. Vol. 4 Nomor 2, 2021
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Sulardi, *"Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak"*, Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 3, 2018

V. Hadiyono, *"Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare state dan Tantangannya"*. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan. Vol 1 Nomor 1, 2020

D. SKIRPSI

Hermawan Puspitaningtyas/ *Implementasi Program Pembinaan Mental Dalam Membentuk Disiplin Taruna Akademi Militer/Skripsi/Universitas Tidar/2016*

Saparudin/*Pendidikan Agama Anak Dalam Keluarga Militer Di Asrama Militer Batalyon Kavaleri 6 Naga Karimata Medan Sunggal Kecamatan Medan Selayang Tahun 2018/Skripsi/Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/2018.*

E. PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen, Jakarta, 2002

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169, (Sekretariat Negara, Jakarta, 2002)

Indonesia, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301, Sekretariat Negara, Jakarta. 2003

Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Sekretariat Negara, Lembaran Negara

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586,
(Jakarta:2005)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601,
Sekretariat Negara, Jakarta, 2014

Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, pasal Lembaran Negara tahun 2014
nomor 297, Tambahan Lembaran Negara nomor 5606,
Sekretariat Negara, Jakarta. 2014

Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor
20 Tahun 2003, Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 43001 (Sekretarian Negara:
Jakarta,2003)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5237, (Sekretariat Negara: Jakarta, 2011)

Indonesia, Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara No 153,
Tambahan Lembaran Negara No 5332 (Jakarta:Sekretariat
Negara) 2012

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah .Lembaran Negara Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5582, (Sekretariat Negara, Jakarta, 2014)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 6842, (Sekretariat Negara: Jakarta, 2023)

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor:
45/PK.03.04/KESRA

F. INTERNET

https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6724, diakses pada 4 juni 2025 pukul 20.29 Wib.

https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6724, diakses pada 4 juni 2025 pukul 20.29 Wib.

<https://www.jabarprov.go.id/berita/274-siswa-sma-smk-ikuti-pendidikan-karakter-pancawaluya-18870>

<https://www.jabarprov.go.id/layanan/generasipancawaluya>
diakses pada 4 juni

<https://www.kompas.com/edu/read/2025/02/25/223814471/penerapan-wajib-militer-untuk-siswasma-jabar-perlu-payung-hukum>, diakses pada 4 juni 2025.

<https://koran.pikiran-rakyat.com/news/amp/pr-30310142925/kejahatan-jalanan-di-jabar-turun-drastis-saat-operasi-ketupat-lodaya-2026> diakses pada 19 April 2026

